



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM  
REPUBLIK INDONESIA

# PELIBATAN KOPERASI DAN UMKM PADA SISTEM PENGADAAN SEKOLAH

Sekretaris Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran

10 November 2020





# Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM





# Peluang Koperasi dan UMKM pada SIPLah

## Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman [siplah.kemendikbud.go.id](http://siplah.kemendikbud.go.id).

## Jenis Besaran Pengadaan

- 1 Pengadaan <Rp 10 juta dan <Rp 10 juta – Rp 50 juta**  
*Tidak wajib melakukan perbandingan harga dan kualitas*
- 2 Pengadaan >Rp 50 juta - <Rp 200 juta**  
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas paling sedikit 2 calon penyedia
- 3 Pengadaan >Rp 200 juta**  
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas paling sedikit 3 calon penyedia

Besaran Penyerapan  
Pengadaan  
Paket SIPLah

**Rp 10,4**  
Triliun

Baru terserap  $\pm 50\%$  dari total nilai pengadaan SIPLah sebesar Rp 20,8 T

## Manfaat SIPLah Bagi UMKM

Dengan bergabung ke dalam SIPLah maka para pelaku usaha, utama UMKM akan mendapatkan beberapa manfaat, antara lain:

1. Perluasan Usaha Secara Daring
2. Tersedia Dashboard Pengawasan
3. Pembayaran Non Tunai
4. Kerjasama Jasa Kurir
5. Bukti Transaksi Elektronik Tersimpan



# Marketplace Mitra SIPLah

1



**PT. Industri Telekomunikasi Indonesia  
(Persero)**

<http://siplah.id>

Pendaftaran Penyedia

Kontak Penyedia

2



**PT. Eureka BookHouse**

<https://siplah.eurekabookhouse.co.id/>

Pendaftaran Penyedia

☎ 021-8779 6010

☎ 0838-1332-2066

3



**PT. Metraplaza**

<https://siplah.blanja.com/>

Pendaftaran Penyedia

☎ (021) 80667878

✉ support@blanja.com

4



**PT. Ladang Karya Husada**

<https://siplah.tokoladang.co.id/>

Pendaftaran Penyedia

☎ 081232568111

☎ 082290361987

✉ customerservice@tokoladang.co.id

5



**PT. Pesona Edukasi**

<https://siplah.pesonaedu.id/>

Pendaftaran Penyedia

☎ 021-29432150

☎ 0812-1151-1121

6



**PT. Global Digital Niaga**

<https://siplah.blibli.com/>

Pendaftaran Penyedia

☎ 021-5797-7777



# Sosialisasi & Onboarding SIPLah Sept – Okt 2020

## Webinar Series 1

- Webinar tentang Pemasaran Online Produk Furniture dan Kerajinan melalui SIPLah untuk Memenuhi Kebutuhan Sekolah Regional 1 dan regional 2.
- Peserta Webinar terdiri dari KUMKM dan Satuan Didik sebanyak 500 peserta

01

03

## Webinar Series 2

- Webinar tentang Pemasaran Online Produk Furniture dan Kerajinan melalui SIPLah untuk Memenuhi Kebutuhan Sekolah Regional 3, 4 dan regional 5.
- Peserta Webinar terdiri dari KUMKM dan Satuan Didik sebanyak 500 peserta

## Sosialisasi & Onboarding

- Kegiatan Onboarding dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur (21 Oktober 2020)
- Peserta offline sebanyak 35 KUMKM dan online sebanyak 42 KUMKM dan telah mendaftar ke MP sebanyak 164 dengan rincian:

- Toko Ladang (PT.Ladang Karya Husada) 20 UMKM
- PT. Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia, Persero) 11 UMKM
- PT. Eureka Book House 25 UMKM
- SIPLah Belanja.com/ PT. Metraplasa 21 UMKM
- Pesona Edu (PT.Pesona Edukasi) 44 UMKM
- Blibli.com (PT.Global Digital Niaga) 24 UMKM

02

04

## Sosialisasi & Onboarding

- Kegiatan Onboarding dilaksanakan di Kota Surakarta, Jawa Tengah (14 Oktober 2020)
- Peserta offline sebanyak 40 KUMKM dan online sebanyak 87 KUMKM dan telah mendaftar ke MP sebanyak 127 dengan rincian:

- Toko Ladang (PT.Ladang Karya Husada) 67 UMKM
- PT. Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia, Persero) 7 UMKM
- PT. Eureka Book House 7 UMKM
- SIPLah Belanja.com/ PT. Metraplasa 42 UMKM
- Pesona Edu (PT.Pesona Edukasi) 16 UMKM
- Blibli.com (PT.Global Digital Niaga) 25 UMKM



1. Informasi & identifikasi rencana kebutuhan peralatan di masing-masing satuan pendidikan
2. Penyusunan daftar kebutuhan pengadaan sekolah oleh Dinas Pendidikan daerah
3. Koordinasi dengan Kemendikbud terkait rencana pengadaan sekolah yang dicatat dalam SIPLah
4. Proses pengadaan dan penunjukan UMKM untuk membeli barang kebutuhan melalui SIPLah

1. Onboarding Koperasi dan UMKM terkurasi ke dalam SIPLah
2. Proses produksi barang sesuai dengan permintaan satuan pendidikan
3. Pengiriman peralatan hasil produksi ke sekolah
4. Pelaporan satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan/ Kemendikbud



# Matriks Rekomendasi, Besaran Pengadaan dan Jenis Komoditas

JENIS BELANJA	JENIS USAHA	REKOMENDASI KOMODITAS
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai <b>&lt;Rp10juta</b>	Mikro & Kecil	Makanan Minuman, ATK, Souvenir
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai <b>&gt;Rp10juta s.d. Rp50juta</b>	Kecil & Menengah	ATK, Catering, Buku, Brosur, Seragam
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai <b>&gt;Rp50juta s.d. Rp200juta</b>	Menengah & Koperasi	Furniture, Alat Komputer, Perkakas
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai <b>&gt;Rp200juta</b>	Menengah & Koperasi	Alat Kesehatan, Alat Peraga, Alat Laboratorium, Kendaraan



## Tantangan

### SUPPLY

1. Prosedur pendaftaran yang belum seragam
2. Persyaratan dokumen PKP dan Non PKP
3. Mitra *marketplace* yang masih terbatas dan komoditas yang masih terbatas
4. Kemampuan UMKM dalam pengoperasian aplikasi pengadaan
5. Sistem pembayaran masih terbatas

### DEMAND

1. Budaya di lingkup pengadaan barang dan jasa terkait dengan persyaratan dan administrasi yang masih menggunakan aturan lama (cap basah, SPK, materai dll).
2. Adanya kekhawatiran para PBJ untuk implementasi mengingat belum ada sosialisasi kepada inspektorat, bagian keuangan, BPK, KPK dan BPKP
3. Belum merata terkait pelatihan untuk dalam penggunaan aplikasi pengadaan (bela pengadaan)
4. Kepastian hukum terkait dengan implementasi inisiatif ini di daerah

## Rekomendasi

1. Dibuat penyeragaman syarat dan proses
2. Penambahan **mitra marketplace** utamanya yang dapat menjangkau pemda di daerah
3. Pelatihan dan pendampingan intensif untuk UMKM secara langsung (ToT untuk Pendamping)
4. Penggunaan KKP untuk transaksi
5. Tagging khusus untuk UMKM di SIPLah

1. Sosialisasi/ training kepada seluruh satker/daerah terkait implementasi aplikasi baru SIPLah,
2. Sosialisasi kepada Inspektorat/ Bagian Keuangan, BPK, KPK dan BPKP dan buat aturan tertulis sebagai dasar hukum
3. Aturan/ SOP terkait detail penggunaan aplikasi dan dan dasar hukumnya
4. Pembentukan regulasi penggunaan KKP untuk Pemerintah Daerah
5. Penerbitan instruksi dari masing-masing kepala daera/ menteri terkait implementasi pengadaan untuk UMKM



# Ayo Kolaborasi!

Diharapkan dinas-dinas tiap provinsi atau kabupaten/ kota dapat mendorong umkm binaannya untuk mendaftar pada aplikasi SIPLah sekaligus menjadi konsumen produk-produk umkm di pada sekolah di daerah masing-masing.

Rencana Indikator Keberhasilan Tiap Daerah:

**Jumlah UMKM  
Terlibat**

**Nilai Transaksi  
UMKM**



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM  
REPUBLIK INDONESIA



# TERIMA KASIH

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)